

**STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
DI KABUPATEN BOGOR**

Disusun Oleh :

NAMA : OEMMY RAMADHANY
NPM : 2342021054
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Oemmy Ramadhany
NPM : 2342021054
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Strategi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro,
(Bahasa Indonesia) Kecil, Menengah Sektor Industri Pengolahan
Di Kabupaten Bogor
Judul Tesis : Capacity Development Strategy for Manufacturing
(Bahasa Inggris) Sector of Micro, Small and Medium Enterprises in
Bogor Regency

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Tesis


Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : OEMMY RAMADHANY
NPM : 2342021054
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TESIS : STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI
KABUPATEN BOGOR

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Juni 2025
Pukul : 10.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS UJIAN TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si

Sekretaris : Arifiani Widjayanti, Sp., M.Si., Ph.D

Anggota : Dr. R. N. Afsdy Saksono, M.Sc

Pembimbing : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Oemmy Ramadhany
NPM : 2342021054
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul “Strategi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Bogor” adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab atas menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Juni 2025
Pembuat Pernyataan,



Oemmy Ramadhany

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah, ridho, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Strategi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bogor” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap.) pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi isi, kedalaman analisis, maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, memberikan dukungan, dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, koreksi, saran, masukan, serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
2. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si., Ibu Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D dan Bapak Dr. RN. Afsdy Saksono, M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan berbagai masukan, saran, dan pemikiran untuk menyempurnakan tesis ini.
3. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S. Sos, MA., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, serta seluruh dosen pengajar Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah, serta staf administrasi akademik dan perpustakaan atas ilmu, bantuan, dan pelayanan selama masa studi.
4. Almarhum Ayahanda Ilyas Husein dan Ibunda Aisyah Yusuf, Ayahanda Jannur Tambunan dan Ibunda Purwiyani selaku mertua, serta kakanda dan adinda tercinta atas doa, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada peneliti.

5. Suami tercinta, Ferri F. A. Tambunan, serta anak-anak tercinta Dzaky, Hanif dan Mizan atas cinta, doa, dan dukungan yang tiada henti sejak awal perkuliahan hingga selesainya tesis ini
6. Bapak Dr. Rusliandy, S.STP., M.Si., M.E selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan amanah tugas belajar kepada peneliti.
7. Bapak Arif Rahman, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan seluruh jajarannya atas dukungan, motivasi, dan izin tugas belajar yang diberikan.
8. Ibu Julaiha Duwila, S.E., M.A. selaku Kepala Bidang Perindustrian yang telah memberikan motivasi, kesempatan, dan arahannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah Kelas Kabupaten Bogor Angkatan 2023 atas semangat kebersamaan, tukar ilmu, serta dukungan selama masa studi dan penyusunan tesis.
10. Seluruh informan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, maka peneliti mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penguatan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan, serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Bogor.

Jakarta, Juni 2025

Oemmy Ramadhany

ABSTRAK

Strategi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Bogor

Oemmy Ramadhany, Edy Sutrisno

2342021054@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Bogor, sebagai wilayah dengan jumlah pelaku UMKM sektor industri pengolahan tertinggi di Jawa Barat, memiliki potensi besar. Namun, pertumbuhan jumlah UMKM belum diiringi dengan peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kuantitas dan kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya kapasitas UMKM serta merumuskan strategi pengembangannya. Pendekatan analisis menggunakan lima tahapan pengembangan kapasitas dari UNDP, yakni pelibatan pemangku kepentingan, penilaian kapasitas, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sebagai penguatan substansi, penelitian ini juga mengintegrasikan empat faktor kunci dari Haryono, yakni komitmen bersama, kepemimpinan inklusif, partisipasi aktif, dan inovasi. Strategi disusun berdasarkan pendekatan tiga tingkatan Horton (mikro, meso, dan makro). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen, serta dianalisis melalui model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan hambatan partisipasi di tahap engage stakeholders, kelemahan SDM dan akses informasi pada assess capacity, ketidaksesuaian program pada formulate, kendala teknis pada implement, dan minimnya evaluasi pada evaluate. Strategi yang diusulkan pada tingkat mikro, penguatan kompetensi pelaku UMKM melalui pelatihan berbasis kebutuhan, pendampingan legalitas, akses teknologi, dan literasi keuangan; pada tingkat meso, penguatan organisasi pendukung melalui standardisasi program pelatihan, pelibatan asosiasi dalam perencanaan dan evaluasi, serta sistem monitoring partisipatif; dan pada tingkat makro, harmonisasi kebijakan, integrasi sistem informasi, serta insentif berbasis performa. Sebagai saran, Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi pembinaan UMKM berbasis klasifikasi usaha, membentuk tim koordinasi lintas OPD, serta mengembangkan indikator mikro yang terstandar dan evaluasi berbasis riset untuk menjamin efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM; industri pengolahan; pengembangan kapasitas; kerangka UNDP; Kabupaten Bogor

ABSTRACT

Capacity Development Strategy for Manufacturing Sector of Micro, Small and Medium Enterprises in Bogor Regency

Oemmy Ramadhany, Edy Sutrisno

oemmy_ramadhany@yahoo.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in regional economic development. As the region with the highest number of MSMEs in the manufacturing sector in West Java, Bogor Regency holds significant economic potential. However, the rapid growth in the number of MSMEs has not been matched by a proportional increase in their contribution to regional economic growth, indicating a gap between quantity and capacity. This study aims to identify the causes of suboptimal MSME capacity and formulate appropriate development strategies. The analysis adopts the five stages of capacity development as proposed by UNDP, namely stakeholder engagement, capacity assessment, program formulation, implementation, and evaluation. To enrich the substance, the study integrates four key factors from Haryono—shared commitment, inclusive leadership, active participation, and innovation. Strategy formulation is guided by Horton's three-level approach (micro, meso, and macro). This study employs a qualitative method using in-depth interviews and document analysis, analyzed through the Miles and Huberman model. The findings indicate participation barriers during the engage stakeholders stage, weaknesses in human resources and information access during assess capacity, misaligned programs at formulate, technical and resource constraints during implement, and limited evaluation mechanisms in evaluate. Proposed strategies include: at the micro level, strengthening MSME actors' competencies through need-based training, legal assistance, access to technology, and financial literacy; at the meso level, strengthening supporting institutions through standardized training programs, involvement of associations in planning and evaluation, and participatory monitoring systems; and at the macro level, harmonizing policies, integrating information systems, and implementing performance-based incentives. It is recommended that local governments establish MSME development regulations based on business classification, form cross-agency coordination teams, and develop standardized micro indicators and research-based evaluations to ensure the sustainable implementation of these strategies.

Keywords: MSMEs; manufacturing industry; capacity development; UNDP framework; Bogor Regency

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xvi
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	19
C. Rumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Tinjauan Kebijakan.....	34
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	34
2. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	35
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri	36
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	37
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.....	38
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	39

7. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor	40
C. Tinjauan Teori	41
1. Administrasi Publik	41
2. Administrasi Pembangunan	42
3. Pembangunan Daerah	44
4. Pembangunan Ekonomi Daerah	46
5. Pengembangan Kapasitas (Capacity Development)	48
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	64
7. Industri Pengolahan	69
D. Operasionalisasi Konsep / Konsep Kunci.....	71
1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	71
2. Kapasitas UMKM.....	72
3. Pengembangan Kapasitas	72
E. Kerangka Berpikir	76
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	79
A. Metode Penelitian	79
B. Teknik Pengumpulan Data	79
1. Wawancara	80
2. Telaah Dokumen.....	83
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	85
1. Reduksi data.....	85
2. Penyajian data	85
3. Kesimpulan dan verifikasi data	86
D. Instrumen Penelitian	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	89
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	89
2. Profil Pelaku UMKM Industri Pengolahan	93
B. Identifikasi Penyebab Belum Optimalnya Kapasitas UMKM Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Bogor	104
1. <i>Engage stakeholders on capacity development</i>	104
2. <i>Asses capacity assets and needs</i>	112
3. <i>Formulate capacity development and program</i>	122

4. <i>Implement a capacity development</i>	134
5. <i>Evaluate capacity development</i>	141
C. Strategi Pengembangan Kapasitas UMKM Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Bogor	149
1. Tingkat Mikro (Individu dan Kelompok)	153
2. Tingkat Meso (Organisasi dan Jaringan)	154
3. Tingkat Makro (Sistem Nasional dan Kebijakan)	155
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	165
A. Simpulan.....	165
B. Saran	169
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN.....	177

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (Persen), 2019-2023	5
Tabel 1.2 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.....	8
Tabel 1.3 Jumlah UMKM Sektor Industri Pengolahan Pada SIINas Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023	10
Tabel 1.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023	11
Tabel 1.5 Jumlah Pertumbuhan UMKM Sektor Industri Pengolahan, Tahun 2023.....	12
Tabel 1.6 Kegiatan Pembinaan UMKM di Kabupaten Bogor, Tahun 2019-2023.....	15
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2 Klasifikasi UMKM	37
Tabel 2.3 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	39
Tabel 2.4 Karakteristik Motivasi Pengusaha UMKM	66
Tabel 2.5 Subsektor Industri Pengolahan	70
Tabel 3.1 Daftar Informan Kunci	80
Tabel 4.1 Data Jumlah Unit UMKM Sektor Industri Pengolahan Berdasarkan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Bogor, Tahun 2024.....	94
Tabel 4.2 Data Jumlah Unit UMKM Sektor Industri Pengolahan Berdasarkan KBLI di Kabupaten Bogor, Tahun 2024.....	97
Tabel 4.3 Data Serapan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerja Sektor Industri Pengolahan Skala Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bogor.....	99
Tabel 4.4 Data Serapan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerja Sektor Industri Pengolahan Skala Usaha Menengah di Kabupaten Bogor.....	100
Tabel 4.5 Data Serapan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Sektor Industri Pengolahan Skala Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bogor.....	101
Tabel 4.6 Data Serapan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Sektor Industri Pengolahan Skala Usaha Menengah di Kabupaten Bogor.....	103
Tabel 4.7 Tabel Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kapasitas UMKM	147

Tabel 4.8 Rekapitulasi Penyebab Belum Optimalnya Kapasitas UMKM Sektor Industri Pengolahan, Strategi, Klasifikasi Tingkatan	149
Tabel 4. 9 Rencana Aksi	162



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat, Tahun 2023	7
Gambar 1.2 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023	9
Gambar 1.3 Distribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023	11
Gambar 1.4 Grafik Pertumbuhan UMKM Sektor Industri Pengolahan, Tahun 2023	12
Gambar 1.5 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen)	13
Gambar 1.6 Sertifikat TKDN IK Kabupaten Bogor Terbit Tahun 2023	17
Gambar 1.7 Data Tenaga Kerja UMKM Sektor Industri Pengolahan	18
Gambar 2.1 Tingkatan Pengembangan Kapasitas	55
Gambar 2.2 Proses Pengembangan Kapasitas	57
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	78
Gambar 4.1 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bogor Tahun 2022.....	91
Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan Jumlah UMKM Sektor Industri Pengolahn di Kabupaten Bogor, 2020-2024.....	93
Gambar 4.3 Grafik Laju Pertumbuhan UMKM Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bogor	94
Gambar 4.4 Grafik Serapan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerja Sektor Industri Pengolahan Skala Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bogor.....	99
Gambar 4.5 Grafik Serapan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerja Sektor Industri Pengolahan Skala Usaha Menengah di Kabupaten Bogor	100
Gambar 4.6 Grafik Serapan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Sektor Industri Pengolahan Skala Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bogor	102
Gambar 4.7 Grafik Serapan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan Sektor Industri Pengolahan Skala Menengah di Kabupaten Bogor	103

Gambar 4. 8 Rekapitulasi Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	109
Gambar 4. 9 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2025.....	136
Gambar 4. 10 <i>Mind Mapping</i> Identifikasi Penyebab Belum Optimalnya Kapasitas UMKM Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Bogor	146
Gambar 4. 11 <i>Framework</i> Pengembangan Kapasitas UMKM Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Bogor.....	158

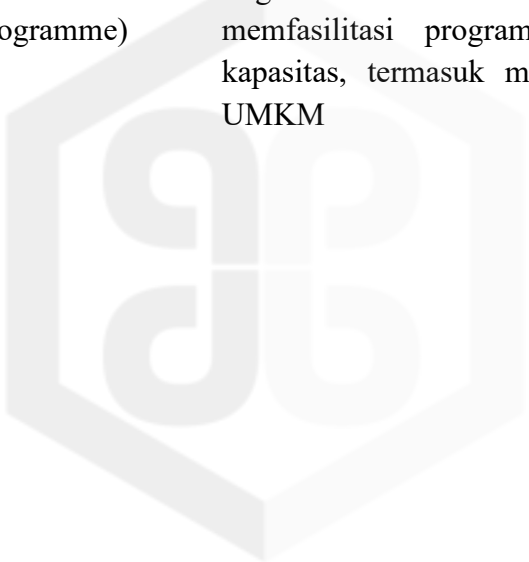
POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISTILAH

ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	: Metode penghitungan PDB atau PDRB berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan, mencerminkan nilai ekonomi aktual tanpa disesuaikan inflasi
BDS (Business Development Service)	: Layanan Pengembangan Bisnis bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas keuangan, kewirausahaan, dan pemasaran
<i>Capacity Building</i> (CB)	: Strategi untuk menciptakan kapasitas baru dalam organisasi atau sistem agar lebih efisien dan efektif
<i>Capacity Development</i> (CD)	: Proses berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas yang sudah ada, baik pada individu, organisasi, maupun sistem
CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik)	: Pedoman teknis yang wajib diikuti oleh pelaku industri makanan olahan untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan
<i>Engage Stakeholders</i>	: Tahap awal dalam model UNDP untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kapasitas
IKM (Industri Kecil dan Menengah)	: Bagian dari UMKM yang bergerak dalam sektor industri pengolahan, termasuk pengolahan makanan, tekstil, logam, dll
Industri Pengolahan	: Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah seperti barang setengah jadi atau barang jadi
<i>Institutional Building</i> (IB)	: Proses pembentukan dan penguatan struktur dan sistem organisasi pemerintahan atau institusi lainnya
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)	: Sistem klasifikasi resmi sektor ekonomi di Indonesia berdasarkan jenis kegiatan usaha

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	: Organisasi non-pemerintah yang berperan dalam advokasi, pendampingan masyarakat, dan pengawasan kebijakan publik
OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	: Lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal
OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach)	: Sistem perizinan berbasis risiko yang memberikan kemudahan berusaha secara daring sesuai dengan tingkat risiko usaha
PDB (Produk Domestik Bruto)	: Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu; indikator utama pertumbuhan ekonomi nasional
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	: Indikator ekonomi yang menunjukkan total nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah
P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)	: Program pemerintah yang mendorong penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa untuk memperkuat industri nasional
SDGs (Sustainable Development Goals)	: Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan
SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)	: Sistem pendataan industri nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian untuk memantau kegiatan usaha, termasuk UMKM sektor industri pengolahan
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)	: Persentase kandungan komponen lokal dalam suatu produk yang digunakan untuk mendorong industri dalam negeri
<i>Triple Bottom Line</i>	: Pendekatan keberlanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan

- UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) : Unit usaha milik individu atau kelompok yang tidak menjadi bagian dari usaha besar, dengan kriteria tertentu terkait modal dan omzet
- UNDP (United Nations Development Programme) : Organisasi internasional yang memfasilitasi program pembangunan kapasitas, termasuk model CD untuk UMKM



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses yang terencana, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata (Tjokrowinoto, 1996). Administrasi publik, khususnya cabang administrasi pembangunan negara, memiliki peran sentral dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada penguatan kapasitas institusi, pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal, serta peningkatan efektivitas pelayanan publik (Damayanti et al., 2014; Masyitah Haruna, 2020). Melalui administrasi pembangunan negara, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatasi kesenjangan struktural dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis. UMKM merupakan pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia dan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian TPB/SDGs, khususnya dalam dimensi pembangunan ekonomi. UMKM berkontribusi besar terhadap pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan (Feriyanto, 2020; Martini & Woyanti, 2022). Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), UMKM menyumbang 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara dengan Rp9.580 triliun, serta menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional.

Kontribusi UMKM dalam pengentasan kemiskinan tidak terlepas dari karakteristik khas yang dimilikinya. Pertama, jumlah pelaku UMKM lebih

banyak dibandingkan pelaku usaha besar, dengan persebaran hingga wilayah pedesaan. Kondisi ini menjadikan UMKM motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan. Kedua, UMKM merupakan sektor padat karya yang menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat mulai dari tingkat pendidikan rendah yang menghadapi keterbatasan akses pekerjaan formal. Ketiga, sebagian besar UMKM beroperasi di sektor agraris, seperti industri rumah tangga yang memproduksi makanan dan minuman serta kerajinan berbahan baku lokal seperti bambu, kayu, dan rotan (Tambunan, 2012). Dengan demikian, UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan (Hendratmoko et al., 2024a; Kementrian Koordinator, 2023).

Secara formal, UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha di berbagai sektor ekonomi. Pengelompokan UMKM didasarkan pada kriteria modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta rata-rata omzet tahunan, sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah (Pemerintah Indonesia, n.d.). Sebagai elemen utama perekonomian nasional, UMKM memerlukan dukungan aktif dari pemerintah pusat dan daerah, yang diwujudkan melalui kebijakan afirmatif, akses pasar yang lebih luas, pembiayaan, dan pelatihan peningkatan dan pengembangan kapasitas. Penciptaan ekosistem usaha yang kondusif oleh pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Khairunnisa et al., 2022).

Selain sebagai entitas bisnis, UMKM juga dapat dipandang sebagai suatu organisasi, yang terdiri dari sekelompok individu dengan tujuan bersama. Dalam perspektif organisasi, UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal guna memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha. Kemampuan adaptasi ini menjadi krusial dalam menghadapi disrupsi ekonomi, perkembangan teknologi, serta dinamika regulasi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas UMKM tidak

dapat dipisahkan dari upaya penguatan organisasi, baik melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), reformasi kelembagaan, maupun inovasi dalam produk dan layanan.

Administrasi publik memiliki peran sentral dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pengelolaan kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran pembangunan yang efektif (Frederickson, 2005). Dalam praktiknya, administrasi publik mendorong penyusunan kebijakan yang pro-UMKM, fasilitasi akses pasar, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing. Sementara itu, administrasi pembangunan negara memberikan kontribusi nyata melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelaku ekonomi lokal agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks ini, kapasitas UMKM menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan intervensi pembangunan ekonomi daerah. Kapasitas UMKM tidak hanya merujuk pada pertumbuhan jumlah unit usaha, melainkan pada kualitas kemampuan pelaku usaha dalam mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan kegiatan bisnisnya secara berkelanjutan, terutama di tengah tantangan struktural seperti disrupsi teknologi, keterbatasan sumber daya, dan persaingan pasar.

Oleh karena itu, pengembangan kapasitas UMKM perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan yang terintegrasi, mencakup dimensi individu (kompetensi SDM), kelembagaan (tata kelola dan legalitas usaha), serta sistemik (akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar). Pemerintah pusat dan daerah memiliki peran strategis dalam membentuk ekosistem usaha yang kondusif, melalui penyederhanaan regulasi, fasilitasi akses pembiayaan, serta penyelenggaraan program pelatihan teknis dan manajerial. Penguatan administrasi pembangunan negara menjadi elemen penting agar kebijakan dan program pengembangan UMKM dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kebijakan nasional, pemerintah memiliki peran utama dalam mendorong pertumbuhan UMKM, terutama melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan regulasi dan mempercepat pengembangan UMKM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020). Implementasi undang-undang ini diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang memprioritaskan pengembangan UMKM melalui akses modal, pelatihan, serta peningkatan kapasitas (Pemerintah Indonesia, n.d.).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko memperkuat penyederhanaan proses perizinan bagi pelaku UMKM. *Sistem Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) yang diimplementasikan mempermudah pengurusan izin usaha, terutama untuk sektor dengan tingkat risiko rendah. Penyederhanaan ini dianggap mendorong UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan memperoleh legalitas yang lebih mudah dan cepat (Ramadhany et al., 2024). Sejak diperkenalkan pada Agustus 2021, OSS RBA telah mempercepat penerbitan izin usaha. Pada tahun 2022, sebanyak 8,71 juta unit UMKM telah mendaftar melalui OSS RBA, dengan Pulau Jawa menyumbang 47% dari total nasional (Srimulyani et al., 2023).

Tabel 1.1
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Provinsi (Persen), 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	1.02	1.06	1.09	1.1	1.11
Sumatera Utara	4.99	5.15	5.07	4.99	5.12
Sumatera Barat	1.53	1.53	1.49	1.49	1.52
Riau	4.74	4.62	4.95	5.18	5
Jambi	1.35	1.3	1.37	1.45	1.43
Sumatera Selatan	2.83	2.88	2.91	3.08	3.06
Bengkulu	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47
Lampung	2.22	2.24	2.19	2.16	2.19
Kep. Bangka Belitung	0.47	0.48	0.51	0.5	0.5
Kep. Riau	1.67	1.61	1.63	1.61	1.62
Dki Jakarta	17.55	17.55	17.18	16.65	16.77
Jawa Barat	13.24	13.21	13.01	12.65	12.79
Jawa Tengah	8.48	8.55	8.38	8.15	8.26
Di Yogyakarta	0.88	0.88	0.88	0.87	0.88
Jawa Timur	14.62	14.59	14.48	14.27	14.38
Banten	4.12	3.97	3.93	3.9	3.96
Bali	1.57	1.42	1.3	1.28	1.34
Nusa Tenggara Barat	0.83	0.85	0.83	0.82	0.81
Nusa Tenggara Timur	0.67	0.68	0.65	0.62	0.63
Kalimantan Barat	1.32	1.36	1.36	1.34	1.34
Kalimantan Tengah	0.94	0.97	1	1.04	1.02
Kalimantan Selatan	1.13	1.14	1.17	1.31	1.31
Kalimantan Timur	4.07	3.86	4.11	4.81	4.11
Kalimantan Utara	0.6	0.64	0.66	0.72	0.72
Sulawesi Utara	0.81	0.84	0.84	0.82	0.84
Sulawesi Tengah	1.16	1.25	1.46	1.69	1.69
Sulawesi Selatan	3.14	3.2	3.21	3.16	3.18
Sulawesi Tenggara	0.81	0.83	0.82	0.83	0.86
Gorontalo	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25
Sulawesi Barat	0.29	0.29	0.3	0.28	0.29
Maluku	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28
Maluku Utara	0.25	0.27	0.31	0.37	0.41
Papua Barat	0.53	0.53	0.5	0.48	0.3
Papua Barat Daya	-	-	-	-	0.18
Papua	1.18	1.26	1.39	1.37	0.4
Papua Selatan	-	-	-	-	0.15
Papua Tengah	-	-	-	-	0.73
Papua Pegunungan	-	-	-	-	0.12
Indonesia	100	100	100	100	100

(Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024)

Tabel 1.1 menyajikan data distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap total PDRB nasional berdasarkan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Penggunaan ADHB bertujuan untuk menunjukkan besarnya kontribusi nominal serta peringkat masing-masing provinsi secara nasional. Data menunjukkan bahwa selama periode 2019–2023, Provinsi Jawa Barat secara konsisten menempati posisi ketiga sebagai kontributor terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Penyajian ini menegaskan konsistensi posisi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar dalam struktur perekonomian nasional. Pada tahun 2023, kontribusi PDRB Jawa Barat tercatat sebesar 12,79% dari total PDRB nasional.

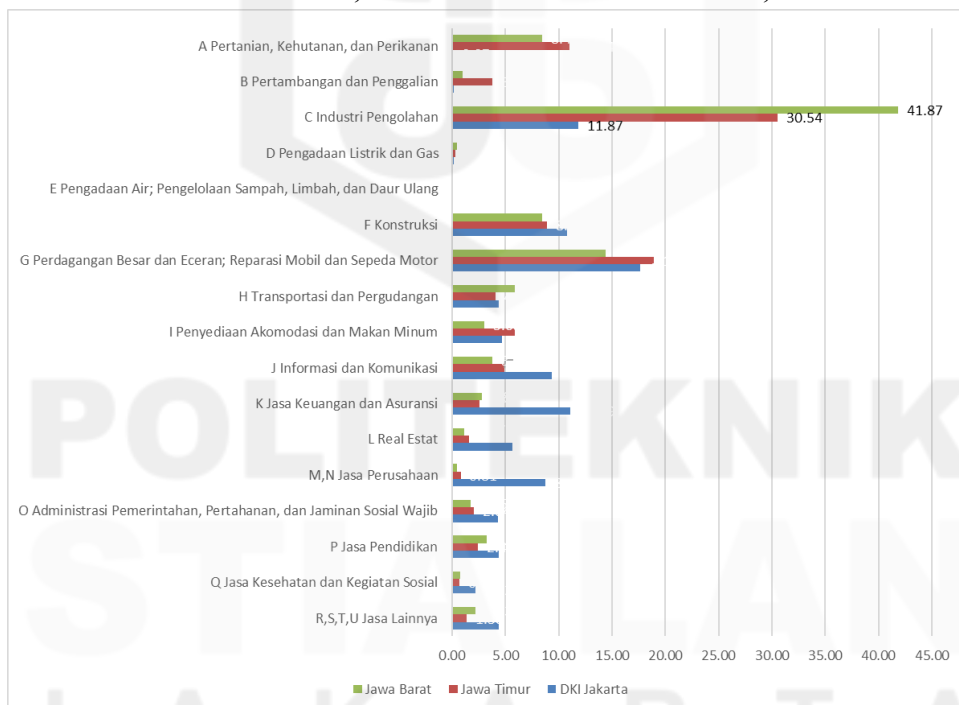
Perekonomian suatu wilayah tidak terlepas dari struktur sektoral yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor utama yang berperan sebagai motor penggerak perekonomian adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian nasional (Bappenas, 2023). Berdasarkan publikasi BPS (2024), industri pengolahan didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan transformasi bahan baku, unsur, atau komponen melalui proses fisik atau kimia menjadi produk baru.

Sebagai sektor strategis, pengembangan industri pengolahan menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Bappenas, 2023).

Gambar 1.1 menyajikan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total PDRB di tiga provinsi berdasarkan ADHB. Penggunaan ADHB dalam konteks ini bertujuan membandingkan persentase kontribusi sektor menurut lapangan usaha dalam struktur PDRB masing-masing provinsi, sehingga tepat

digunakan untuk mengidentifikasi sektor dominan di setiap wilayah. Data menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang tertinggi dalam struktur PDRB, melampaui sektor lainnya. Persentase kontribusi sektor ini juga lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta dan Jawa Timur, mengukuhkan posisi Jawa Barat sebagai pusat industri manufaktur nasional dengan daya saing yang kuat.

Gambar 1.1
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat, Tahun 2023



(Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024)

Tabel 1.2
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Juta Rupiah	Persentase
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	221,650,600.03	8.44%
B. Pertambangan dan Penggalian	26,089,297.74	0.99%
C. Industri Pengolahan	1,099,081,220.18	41.87%
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12,221,172.08	0.47%
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,575,781.60	0.10%
F. Konstruksi	221,150,709.30	8.42%
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	378,832,691.41	14.43%
H. Transportasi dan Pergudangan	155,099,806.66	5.91%
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79,501,421.71	3.03%
J. Informasi dan Komunikasi	100,002,583.51	3.81%
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	74,126,253.81	2.82%
L. Real Estate	30,746,379.01	1.17%
M,N. Jasa Perusahaan	12,091,465.52	0.46%
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	46,278,924.00	1.76%
P. Jasa Pendidikan	86,301,837.84	3.29%
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,978,214.76	0.80%
R,S,T,U. Jasa lainnya	58,490,224.93	2.23%
Produk Domestik Regional Bruto	2,625,218,584.10	100.00%

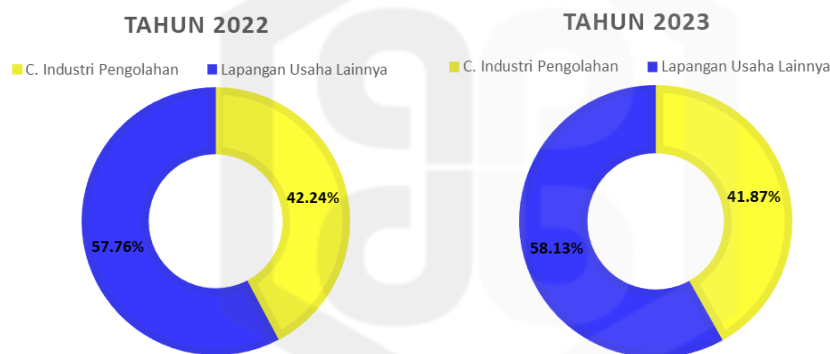
(Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024)

Pada tingkat regional, sektor industri pengolahan memegang peranan kunci di Provinsi Jawa Barat khususnya melalui kontribusi signifikan dari pelaku UMKM yang mendominasi sektor ini di berbagai kabupaten/kota. Berdasarkan data PDRB menurut lapangan usaha yang disajikan dalam Tabel 1.2, sektor industri pengolahan tercatat sebagai penyumbang utama terhadap total PDRB Jawa Barat. Pada tahun 2023, kontribusi sektor ini mencapai Rp1.099.081.220,18 juta (1.099 Triliun) atau 41,87% dari total PDRB provinsi. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang Rp221.650.600,03 juta (221 Triliun), serta sektor perdagangan besar dan eceran yang memberikan kontribusi Rp378.832.691,41 juta (378 Triliun).

Dominasi sektor industri pengolahan mencerminkan perannya sebagai motor utama perekonomian daerah, yang tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi tetapi juga meningkatkan daya saing regional dan menciptakan lapangan kerja (Bappenas, 2023; BPS Provinsi Jawa Barat, 2024). Kinerja sektor industri pengolahan dianggap vital dalam menentukan keberhasilan pembangunan wilayah, mengingat kontribusinya yang besar

terhadap PDRB. Peningkatan PDRB secara konsisten menjadi indikator penting dalam menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Feronika Br Simanungkalit, 2020).

Gambar 1.2
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023



(Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024)

Meskipun kontribusi sektor industri pengolahan signifikan terhadap perekonomian Jawa Barat, sektor ini menghadapi tantangan struktural. Data BPS menunjukkan pangsa sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 42,44% pada tahun 2022 menjadi 41,87% pada tahun 2023 (BPS Indonesia, 2024). Penurunan ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan strategis, terutama dalam mendukung UMKM sektor industri pengolahan sebagai bagian dominan dalam ekosistem industri tersebut.

Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, memiliki tiga kabupaten/ kota dengan jumlah UMKM sektor industri pengolahan terbesar, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tahun 2023, Kabupaten Bekasi mencatat 1.787 pelaku UMKM atau 22,00% dari total UMKM sektor industri pengolahan di Jawa Barat. Kabupaten Bogor menyusul dengan 1.262 pelaku UMKM atau 15,53%, sementara Kota Bekasi memiliki 817 pelaku UMKM atau 10,06% dari total.

Tabel 1.3
Jumlah UMKM Sektor Industri Pengolahan Pada SIINas Berdasarkan
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

No.	Nama Kabupaten / Kota	Jumlah	Persentase
1	Kabupaten Bekasi	1787	22.00%
2	Kabupaten Bogor	1262	15.53%
3	Kota Bekasi	817	10.06%
4	Kota Bandung	790	9.72%
5	Kabupaten Bandung	681	8.38%
6	Kabupaten Karawang	467	5.75%
7	Kabupaten Cirebon	277	3.41%
8	Kota Depok	232	2.86%
9	Kabupaten Bandung Barat	218	2.68%
10	Kota Bogor	204	2.51%
11	Kota Cimahi	201	2.47%
12	Kabupaten Sukabumi	191	2.35%
13	Kabupaten Purwakarta	180	2.22%
14	Kabupaten Sumedang	111	1.37%
15	Kabupaten Garut	104	1.28%
16	Kabupaten Majalengka	82	1.01%
17	Kabupaten Subang	80	0.98%
18	Kabupaten Cianjur	77	0.95%
19	Kabupaten Tasikmalaya	73	0.90%
20	Kota Tasikmalaya	59	0.73%
21	Kabupaten Ciamis	41	0.50%
22	Kabupaten Kuningan	40	0.49%
23	Kota Banjar	40	0.49%
24	Kabupaten Indramayu	37	0.46%
25	Kota Cirebon	35	0.43%
26	Kota Sukabumi	31	0.38%
27	Kabupaten Pangandaran	7	0.09%
	Total	8124	

(Kementerian Perindustrian, Sistem Informasi Industri Nasional, 2024)

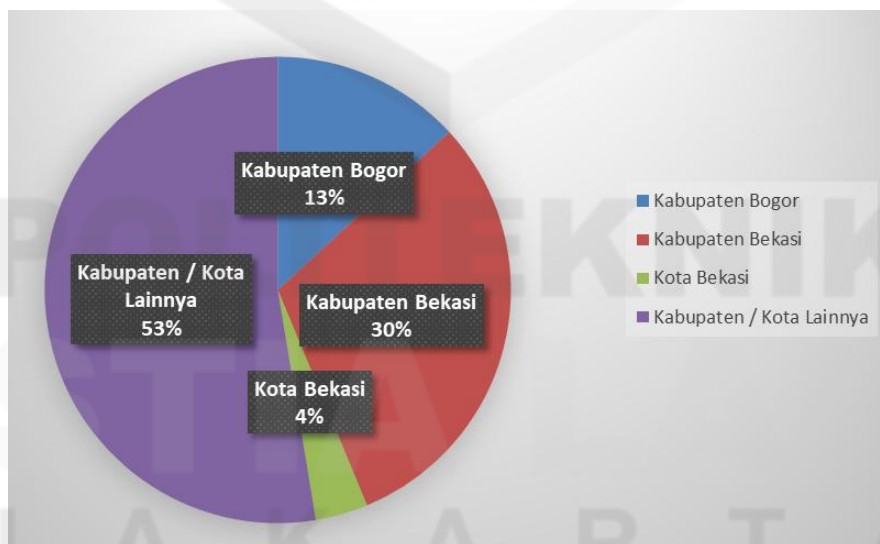
Dari perspektif kontribusi ekonomi, data BPS menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat, yaitu 30,59% atau senilai 218.988,74 miliar (218 triliun) rupiah. Kabupaten Bogor menyumbang 13,16% atau 94.177,84 miliar (94 triliun) rupiah, sedangkan Kota Bekasi menyumbang 3,64% atau 26.027,68 miliar (26 triliun) rupiah. Hal ini menegaskan peran penting Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor sebagai pusat utama industri pengolahan di Jawa Barat.

Tabel 1.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023

Nama Kabupaten / Kota	Miliar Rupiah	% Distribusi
Kabupaten Bekasi	218,988.74	30.59%
Kabupaten Bogor	94,177.84	13.16%
Kota Bekasi	26,027.68	3.64%
Kabupaten / Kota Lainnya	376,612.37	52.61%
Total Provinsi Jawa Barat	715,806.63	100.00%

(Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024)

Gambar 1.3
Distribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten / Kota di
Provinsi Jawa Barat, Tahun 2023



(Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024)

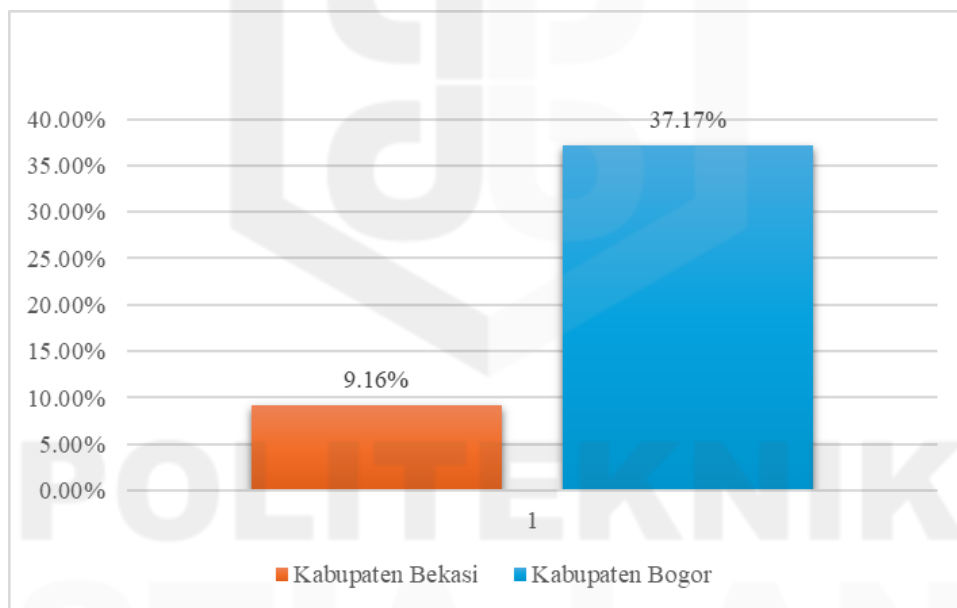
Pada tahun 2023, jumlah UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 37,17%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi yang hanya mencatat pertumbuhan 9,16%. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar Kabupaten Bogor dalam pengembangan sektor industri pengolahan, yang dapat menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 1.5
Jumlah Pertumbuhan UMKM Sektor Industri Pengolahan, Tahun 2023

Nama Kabupaten / Kota	2022	2023	Laju Pertumbuhan (%)
Kabupaten Bekasi	1637	1787	9.16%
Kabupaten Bogor	920	1262	37.17%

(Kementerian Perindustrian, Sistem Informasi Industri Nasional, 2024)

Gambar 1.4
Grafik Pertumbuhan UMKM Sektor Industri Pengolahan, Tahun 2023

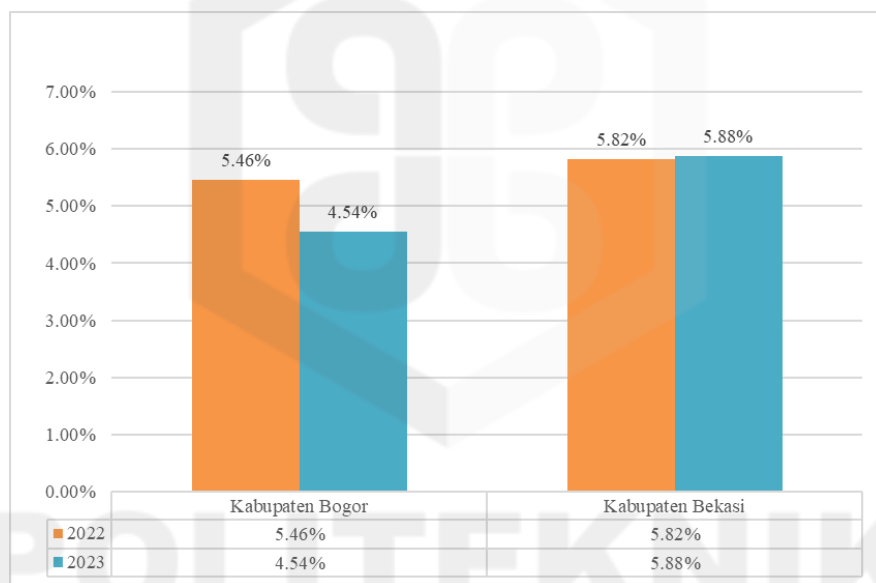


(Kementerian Perindustrian, Sistem Informasi Industri Nasional, 2024)

Meskipun Kabupaten Bogor mencatat pertumbuhan jumlah UMKM yang signifikan, pertumbuhan ekonominya masih berada pada angka negatif yaitu -0,92%. Tingkat pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor tercatat sebesar 4,54% pada tahun 2023, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,46%. Sebaliknya, Kabupaten Bekasi berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 0,06%, dengan peningkatan laju pertumbuhan PDRB dari 5,82% pada tahun 2022 menjadi 5,88% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan

strategi pengembangan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Gambar 1.5
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen)



(Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024)

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pengembangan kapasitas (capacity development) menjadi aspek yang sangat penting. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pengembangan kapasitas merupakan proses untuk memperkuat kemampuan individu, organisasi, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (United Nations Development Programme, 2008). Dalam mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk, dimana peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan produk unggulan daerah dan menyusun langkah-langkah pengembangan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, kapasitas UMKM sektor industri pengolahan dimaknai sebagai kemampuan menyeluruh yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menjalankan, mempertahankan, dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Kapasitas ini mencerminkan kemampuan UMKM untuk beradaptasi terhadap perubahan pasar, regulasi, teknologi, serta persaingan usaha melalui pemanfaatan sumber daya internal dan dukungan eksternal secara optimal. Secara operasional, kapasitas UMKM dimaknai melalui tiga indikator pengukuran utama, yaitu: (1) kualitas sumber daya manusia, yang mencakup keterampilan teknis dan manajerial pelaku usaha; (2) akses terhadap modal dan pembiayaan, sebagai penunjang keberlanjutan usaha; dan (3) penggunaan teknologi dan inovasi dalam proses produksi, yang mendorong efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan pasar (United Nations Development Programme, 2008). Ketiga indikator ini diturunkan dari tiga dimensi fundamental dalam pendekatan pengembangan kapasitas menurut UNDP, yakni: kapasitas individu (kompetensi pelaku usaha), kapasitas kelembagaan (struktur, sistem, dan legalitas usaha), dan kapasitas sistemik (dukungan regulasi, akses pembiayaan, dan infrastruktur pendukung). Dengan demikian, kapasitas UMKM tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif seperti jumlah unit usaha yang aktif, tetapi lebih dalam lagi mencakup kualitas kelembagaan, kemampuan inovatif, dan efektivitas sistem pendukung yang menyertainya. Penilaian terhadap kapasitas ini penting sebagai dasar untuk menyusun strategi penguatan UMKM secara komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, berbagai kegiatan pembinaan telah dilaksanakan dalam periode 2019 hingga 2023 guna meningkatkan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, telah dilakukan berbagai program pelatihan, seperti pelatihan keterampilan teknis, pendampingan sertifikasi, pengembangan

desain produk, peningkatan daya saing usaha, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan.

Tabel 1.6
Kegiatan Pembinaan UMKM di Kabupaten Bogor, Tahun 2019-2023

Tahun	Nama Kegiatan
2019	Pelatihan AMT (Achievement Motivation Training)
	Pelatihan Desain dan Diversifikasi Produk Alas Kaki
	Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM)
	Pembinaan dan Pelatihan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
	Sosialisasi dan Proses Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan anak
	Pengembangan Desain IKM Fashion
	Workshop Legalitas Perlindungan IKM
	Pengembangan Sentra Alas Kaki
	Pengembangan Sentra Tas
	Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan IKM
	Pengembangan Desain Kemasan IKM Produk Pangan
	Diversifikasi Produk IKM
	Pelatihan Good Manufacturing Practice (GMP)
	Pengembangan IKM Jasa
	Pembinaan Legalitas Sertifikasi Produk Halal IKM
	Pembinaan Legalitas Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
	Pembinaan IKM pada Kawasan Agropolitan
	Pembinaan IKM pada Kawasan Minapolitan
	Pembinaan IKM pada Kawasan Geopark
	Pembinaan IKM pada Kawasan Destinasi Wisata Kreatif
	Pembinaan IKM pada Kawasan Pengembangan Kopi
	Pengembangan Kompetensi IKM
	Pengembangan Desain IKM Craft
	Pengembangan Sentra Logam
	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas
	Sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
2020	Kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Industri Kecil dan Menengah
	Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
	Kegiatan Pelatihan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru IKM
	Kegiatan Sosialisasi Kampung Wirausaha
	Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemasaran
	Kegiatan Pelatihan Diversifikasi Bagi UMK
	Kegiatan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Industri Kecil dan Menengah
2021	Kegiatan Pelatihan Penguatan dan Pengembangan Usaha Bagi Para Pengrajin Dimasa Pandemi Covid-19
	Kegiatan Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru
	Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
	Kegiatan Bazar UMKM
	Kegiatan Pelatihan E-Commerce Bagi Usaha Mikro Di Sektor Perikanan / Peternakan
	Kegiatan Pelatihan Vocational Bagi Usaha Mikro Di Sektor Home Décor
	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro
	Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Kegiatan Pelatihan Akses Permodalan UMKM
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Industri, Koperasi dan UKM

Tahun	Nama Kegiatan
2022	Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendampingan 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin) Bagi IKM Logam
	Kegiatan Bimbingan Teknis Registrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Kegiatan Pendampingan Tata Cara Penyampaian Laporan Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Kegiatan Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bagi UMKM
	Kegiatan Pameran Produk UMKM dan IKM
	Kegiatan Bimbingan Teknis Skema Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
	Kegiatan Bimbingan Teknis Keamanan Keselamatan Kerja (K3) Proses Hasil Produksi dan Pengujian Sektor Industri
	Kegiatan Pelatihan Akuntansi
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bagi Usaha Mikro
	Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
2023	Kegiatan Bimbingan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
	Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya IKM Logam
	Kegiatan Bimbingan Teknis Olahan Kopi
	Kegiatan Bimbingan Teknis Registrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Kegiatan Pendampingan Tata Cara Penyampaian Laporan Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Kecil
	Kegiatan Bimbingan Teknis Skema Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
	Kegiatan Pengembangan IKM Tata Busana
	Kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan Berbasis Resiko melalui nline Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)
	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Desain Kemasan IKM Produk Pangan
	Kegiatan Pameran Dagang Nasional
	Kegiatan Pameran Dagang Lokal
	Kegiatan Pelatihan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Kegiatan Bimbingan Teknis Good Manufacturing Practice (GMP)
	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
	Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
	Kegiatan Pelatihan Akses Pasar
	Kegiatan Pelatihan Membatik
	Kegiatan Pelatihan Akses Permodalan
	Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Kemasan Produk
	Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal
	Kegiatan Pelatihan Fasilitasi Digital

(Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, data diolah, 2024)

Dalam tabel Kegiatan Pembinaan UMKM di Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023, terlihat bahwa pemerintah telah menyelenggarakan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Beberapa kegiatan utama meliputi:

1. Pelatihan keterampilan teknis dan inovasi produk, seperti Pelatihan Desain dan Diversifikasi Produk Alas Kaki (2019), Pengembangan Desain IKM Fashion (2019), serta Kegiatan Bimbingan Teknis Olahan Kopi (2023).

2. Program sertifikasi dan peningkatan kualitas produk, seperti Pembinaan Legalitas Sertifikasi Produk Halal IKM (2019), Sosialisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (2019), serta Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal (2023).
3. Pelatihan manajerial dan penguatan kapasitas SDM, seperti Kegiatan Pelatihan Manajemen Pemasaran (2020), Kegiatan Pelatihan Akuntansi (2022), serta Kegiatan Pelatihan Fasilitasi Digital (2023).
4. Dukungan akses pasar dan permodalan, seperti Kegiatan Pelatihan Akses Permodalan UMKM (2021), Kegiatan Pameran Dagang Nasional dan Lokal (2023), serta Kegiatan Pelatihan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (2023).

Meskipun pelatihan telah dilakukan secara rutin, efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil pelatihan terkait sertifikasi TKDN. Meskipun telah dilakukan pelatihan seperti Sosialisasi TKDN (2019) dan Pendampingan Sertifikasi TKDN (2023), hingga tahun 2023 hanya 4,13% dari total 1.333 UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor yang berhasil memperoleh sertifikasi TKDN. Capaian ini menunjukkan bahwa pelatihan belum sepenuhnya berhasil mendorong implementasi di lapangan.

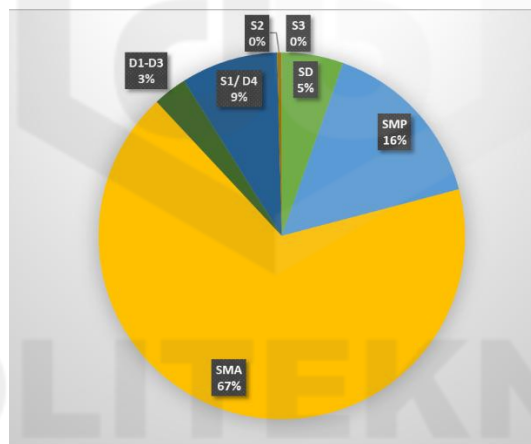
Gambar 1.6
Sertifikat TKDN IK Kabupaten Bogor Terbit Tahun 2023



(Kementerian Perindustrian, data diolah, 2023)

Selain itu, dari sisi kualitas SDM, data menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja UMKM di Kabupaten Bogor hanya berpendidikan menengah (SMA) sebesar 67,13%, sementara lulusan pendidikan tinggi sangat rendah: D1–D3 hanya 3,00%, S1/D4 sebesar 8,55%, S2 sebesar 0,38%, dan S3 hanya 0,03% (Kementerian Perindustrian, 2024). Kesenjangan ini memperkuat dugaan bahwa pelatihan yang telah dilakukan sulit diinternalisasi oleh pelaku usaha karena keterbatasan latar belakang pendidikan.

Gambar 1.7
Data Tenaga Kerja UMKM Sektor Industri Pengolahan



(Kementerian Perindustrian, Sistem Informasi Industri Nasional, 2024)

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan hasil pelatihan dengan praktik bisnis UMKM secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan kapasitas yang lebih terarah dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pelatihan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam **strategi pengembangan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor**, guna memastikan bahwa program yang telah dilakukan dapat memberikan dampak nyata terhadap daya saing UMKM serta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, berikut adalah beberapa identifikasi masalah yang dapat dirumuskan:

1. Peningkatan jumlah pelaku UMKM sektor industri pengolahan, tetapi terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada sektor ini.
2. Kontribusi dari sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Rendahnya jumlah UMKM sektor industri pengolahan yang memiliki sertifikasi TKDN.
4. Mayoritas tenaga kerja UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten bogor memiliki kemampuan inovasi dan daya saing yang terbatas.
5. Program pembinaan UMKM sektor industri pengolahan yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bogor belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Penelitian ini didasarkan pada data dan kegiatan pembinaan UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor yang berlangsung selama periode 2019 hingga 2023.

C. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor belum optimal?
2. Bagaimana strategi pengembangan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi penyebab belum optimalnya kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor.

2. Menyusun strategi pengembangan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari, khususnya dalam konteks pengembangan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai penyebab belum optimalnya kapasitas UMKM sektor industri pengolahan, serta mendukung pengembangan strategi yang tepat untuk peningkatannya.
2. Dalam bidang praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk diskusi kebijakan yang lebih strategis dalam meningkatkan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor. Dengan menyusun strategi yang tepat, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan terkait penyebab kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor belum optimal serta dapat merumuskan strategi pengembangan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor.

1. Penyebab belum optimalnya kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor tersebar pada seluruh tahapan pengembangan kapasitas menurut UNDP (2008), dan berkorelasi dengan empat dimensi pengembangan kapasitas menurut Haryono et al. (2012), yaitu.
 - a. **Komitmen Bersama** belum terbangun secara kuat di antara pemangku kepentingan. Hal ini tercermin pada lemahnya koordinasi lintas lembaga dan ketidakterpaduan dalam perencanaan lintas sektor. Fragmentasi peran dan ketimpangan dalam desain program memperkuat indikasi lemahnya komitmen kolektif terhadap pengembangan kapasitas UMKM secara berkelanjutan.
 - b. **Kepemimpinan yang Kondusif** masih menjadi tantangan, terlihat dari ketidakjelasan pembagian peran antar aktor pemerintah, asosiasi, dan komunitas. Selain itu, keterbatasan kewenangan dan ketidakselarasan antarkebijakan menandakan lemahnya arah dan kendali strategis dalam pengembangan UMKM. Evaluasi yang bersifat administratif juga menunjukkan absennya kepemimpinan dalam menciptakan sistem reflektif dan korektif.
 - c. **Partisipasi pelaku usaha** dalam proses pembangunan kapasitas belum optimal. Fragmentasi forum, rendahnya motivasi tumbuh pelaku UMKM, serta partisipasi yang minim dalam proses sertifikasi

dan evaluasi mencerminkan kurangnya keterlibatan aktif dan rasa kepemilikan dalam proses pengembangan kapasitas.

- d. **Inovasi** sebagai penggerak peningkatan daya saing UMKM belum berkembang secara optimal. Kesenjangan integrasi sistem informasi, keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi, serta ketiadaan insentif dan indikator evaluasi inovatif menjadi penghambat utama dalam mendorong adaptasi dan pembaruan yang dibutuhkan pelaku UMKM.
 - e. Selain empat dimensi utama tersebut, **faktor standar teknis dan kelembagaan**, seperti rendahnya keterampilan teknis dan manajerial, serta hambatan legalitas yang berdampak pada akses pembiayaan, juga turut menjadi faktor penyebab yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pendekatan Haryono et al. (2012). Faktor ini menunjukkan perlunya penambahan dimensi “standarisasi dan kesiapan sistemik” sebagai elemen pendukung penting dalam pengembangan kapasitas UMKM..
2. Strategi pengembangan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor dirumuskan berdasarkan pendekatan Horton yang mencakup tiga level intervensi:
- a. **Strategi Tingkat Mikro (Individu dan Kelompok Pelaku Usaha)**, Strategi ini berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM secara langsung melalui:
 - Pelatihan tersegmentasi berdasarkan klasifikasi usaha (mikro, kecil, menengah) dan subsektor (makanan, logam, tekstil, dll), dengan kurikulum berbasis kebutuhan lokal.
 - Mentoring dan coaching dilakukan secara intensif oleh wirausahawan sukses dan alumni program pelatihan, dengan durasi pendampingan minimal tiga bulan, selaras dengan periode pelaporan kinerja UMKM dalam sistem SIINas.

- Klinik legalitas dan literasi administrasi yang menjangkau hingga tingkat kecamatan untuk membantu perizinan, NIB, dan pencatatan keuangan sederhana.
 - Fasilitasi sertifikasi dan teknologi tepat guna, seperti pelatihan pengurusan PIRT, Halal, TKDN, dan demo alat produksi efisien.
 - Program digitalisasi pasar melalui pelatihan *e-commerce*, foto produk, dan manajemen media sosial.
 - Pendampingan pasca-pelatihan berbasis sistem *tracking* (misalnya melalui aplikasi atau *Google Form* berkala) untuk memantau progres usaha dan kendala lanjutan
- b. **Strategi Tingkat Meso (Organisasi dan Jaringan)**, strategi ini diarahkan pada penguatan kelembagaan dan koordinasi antar aktor pendukung UMKM, mencakup :
- Penguatan Forum Koordinasi UMKM Daerah dengan jadwal tetap per triwulan yang melibatkan OPD teknis, pelaku usaha, dan sektor swasta.
 - Skema kemitraan strategis antara asosiasi UMKM dengan OPD dan akademisi dalam merancang modul pelatihan, inkubasi, dan event promosi.
 - Standardisasi modul pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan lokal, disusun bersama akademisi dan pelaku usaha.
 - Segmentasi program berdasarkan data klasifikasi usaha, dengan pendekatan: “one data–one strategy” (misalnya: UMKM mikro informal difokuskan ke legalitas, UMKM kecil formal difokuskan ke ekspansi).
 - Evaluasi program berbasis partisipasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) *pasca-pelatihan* dan *dashboard* kinerja daring yang dapat diakses lintas OPD.

- Kolaborasi tripartit (pemerintah–akademisi–swasta) dalam bentuk program magang industri, *business matching*, dan akselerasi produk unggulan lokal
- c. **Strategi Tingkat Makro (Sistem Nasional dan Kebijakan)**, strategi ini ditujukan untuk membangun sistem pendukung yang kondusif melalui :
- Integrasi data SIINas–OSS RBA–Sistem Perencanaan Daerah, disertai pelatihan teknis bagi operator daerah dan pelaku usaha.
 - Reformulasi regulasi lintas OPD untuk menyinkronkan peran pembinaan UMKM berdasarkan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Urusan Pemerintahan mencantumkan urusan pembinaan UMKM dalam beberapa perangkat daerah, seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bahkan Dinas Tenaga Kerja.
 - Skema insentif berbasis kinerja, misalnya: insentif bagi pelaku usaha yang lolos sertifikasi, mampu ekspor, atau menciptakan lapangan kerja.
 - Kebijakan berbasis riset lokal, melalui kajian rutin bersama perguruan tinggi untuk mengukur kebutuhan riil dan dampak program UMKM.
 - Koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyusunan *road map* penguatan industri kecil, melalui *MoU* lintas sektor (Kemenperin, Kemendagri, Kemenkop).
 - Penetapan standar layanan minimal nasional, meliputi: rasio pendamping per UMKM, durasi pelatihan, skema pembiayaan, dan kriteria keberhasilan pembinaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, berikut disampaikan saran yang dapat dijadikan pedoman prioritas dalam mengimplementasikan strategi pengembangan kapasitas UMKM sektor industri pengolahan di Kabupaten Bogor:

1. Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor perlu menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan UMKM melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kapasitas UMKM, serta mendorong integrasi strategi ini ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Strategi pembinaan yang telah dirumuskan perlu menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala OPD dan menjadi indikator kinerja utama (IKU) pembangunan ekonomi daerah.
2. Pelaksanaan strategi pengembangan kapasitas UMKM membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kapasitas UMKM dengan melibatkan:
 - Dinas Koperasi dan UMKM sebagai koordinator pelaksanaan program pembinaan berbasis klasifikasi usaha;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai penanggung jawab fasilitasi teknologi, legalitas usaha, dan penguatan jejaring pemasaran;
 - Bappedalitbang sebagai penyusun *roadmap* dan perencana integrasi program ke dalam dokumen perencanaan daerah;
 - Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk penyusunan regulasi dan integrasi kinerja OPD;
 - Diskominfo untuk mendukung digitalisasi data UMKM dan literasi teknologi informasi;

- Akademisi, pelaku usaha besar, dan komunitas UMKM sebagai mitra kolaboratif dalam pelaksanaan program dan evaluasi berbasis *outcome*.
3. Untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi, disarankan agar indikator mikro pengembangan kapasitas UMKM segera disusun secara terstandar dan digunakan sebagai dasar evaluasi program. Kolaborasi dengan akademisi sangat penting dalam proses penyusunan indikator dan pelaksanaan evaluasi berbasis bukti (*evidence-based evaluation*), guna menjamin kualitas dan ketepatan kebijakan pengembangan UMKM.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

1. Jurnal

- Agustin, E. N., Sabrina, R. S. N., Maghfiroh, S. A., & Setiyawati, M. E. (2022). Analisis Pengaruh Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Meningkatkan Keuangan dan Derajat Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4).
- Amir, R. (2024). Gorontalo Development Review Pengukuran Daya Saing Wilayah Berbasis Indeks Pembangunan Daerah. *Gorontalo Development Review*, 7(2).
- Depari, E. T. (2024). Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. *About*, 1(5).
- Erina, N. P. D., & Wayan, S. (2016). Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Penekanan Anggaran, Kapasitas Individu, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 973–1000.
- Ferdinand, A. K., & Amrullah, R. (2021). Micro Small-Level Enterprises (MSES) and Cooperatives in Presidential Regulation Number 12 of 2021. *Journal of Advance in Social Sciences and Policy*, 1(2), 103–113. <http://inaproc.id/ukm>
- Feriyanto, N. (2020). Economic and Tourism Factors Affecting the Real Gross Regional Domestic Product: A Case Study. *European Research Studies Journal*, XXIII(3), 736–756.
- Feronika Br Simanungkalit, E. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Management*, 13(3), 327–340.
- Hasan Zakaria, A., Firdaus, F., Febriansyah Arifin, K., Munawar, sum, & Gunawan, A. (2023). Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 6(1).
- Hendratmoko, Sirait, H., Meiden, C., Sandra, A., & Endri, E. (2024). The Role of ECAP in Enhancing the Capacity of MSMEs for Export: Case of Jakarta MSMEs Community. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 06(04), 271–278. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2024.5127>
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6).
- Irawan, B. (2016b). Organizational capacity development to respond to social services for homeless children. *Indian Journal of Science and Technology*, 9(39). <https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i39/93184>
- Irawan, B., & Suryani, E. (2020). Institutional Capacity Development on Micro, Small and Medium Enterprises through Business Development Service In Banten Province, Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(08), 1223–1230. <http://www.depkop.go.id/data->

- Iskandar, Y., Zulbainarni, N., & Jahroh, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Usaha dan Wirausaha Terhadap Kinerja UMKM Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31002/rn.v4i1.2205>
- Keban, Y. T. (2000). Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*.
- Kristiana, Y., & Nathalia, T. C. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Kreatif di Kampung Bekelir Kota Tangerang. *Journal of Hospitality & Tourism Innovation*, 6(1), 09–18.
- Li, W., & Pang, W. (2023). Digital inclusive finance, financial mismatch and the innovation capacity of small and medium-sized enterprises: Evidence from Chinese listed companies. *Heliyon*, 9(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13792>
- Mahadiansar, Ikhsan, K., Sentanu, I. G. P. S., & Aspariyana. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(7), 77–92.
- Mariya Ulfa, Fauzi, A., & Hidayat, Moh. R. (2020). Identification of Leading Sector Priorities and Spatial Interactions as Effort to Increase The Economic Growth Rate of Bondowoso District. *East Java Economic Journal*, 4(2), 162–192. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v4i2.33>
- Marpaung, Y. T. F., Hutagaol, P., Limbong, W., & Kusnadi, N. (2011). Perkembangan Industri Gula Indonesia Dan Urgensi Swasembada Gula Nasional. *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)*, 2(1).
- Martini, D., & Woyanti, N. (2022). Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan 35 Kab/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020). *Business Economic Entrepreneurship*, V(2).
- Ma'ruf, M., Ikhbaluddin, I., Suropto, S., & Abdurrohman, A. (2021). Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pertanian Di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 6(1), 16–32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1512>
- Mutmainah, I., & Cahyono, H. (2021). Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan. *Independent : Journal Of Economics*, 1(1), 186–204.
- Permatasari, P., & Gunawan, J. (2023). Sustainability policies for small medium enterprises: WHO are the actors? *Cleaner and Responsible Consumption*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.clrc.2023.100122>
- Portes, A. (1976). On the Sociology of National Development: Theories and Issues. *American Journal of Sociology*, 82(1), 55–85. <http://www.jstor.org/stable/2777461>
- Pramaria, A. (2023). Strategi Penumbuhkembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(1), 13–18.
- Prasetyo, A., & Wibowo, S. (2022). Strategi Peningkatan Penggunaan Produk UMK Paska UU Cipta Kerja. In *Jurnal Budget* (Vol. 7, Issue 2).

- Rachmad, A. F., Xusan, Q. N., Azzahra, N., & Azaria, E. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02).
- Ra'is, D. U., Setyawan, D., & Dimus, Y. (2020). Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2). <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.1910>
- Ramadhany, O., Ariestha, B., & Asropi, A. (2024). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM Pasca Covid-19 di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(3), 350–359. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i3.906>
- Risca Amalia, N. (2018). Pengembangan Kapasitas Masyarakat Terdampak Penutupan Lokalisasi Jarak-Dolly Oleh Pemerintah Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(3).
- Saidah, C., Institut, Y., Islam, A., Laa, N., Bogor, R., Institut, S. A., Wasliman, I., & Sauri, R. S. (2020). Kebijakan Publik Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan Dalam Kompleksitas Perkembangan: Kajian Rencana Pembangunan Nasional. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 2(2), 126. <https://doi.org/10.17467/jdi.v2i2.342>
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, D. M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 231. www.publikasi.unitri.ac.id
- Srimulyani, V. A., Hermanto, Y. B., Rustiyaningsih, S., & Setiyo Waloyo, L. A. (2023). Internal factors of entrepreneurial and business performance of small and medium enterprises (SMEs) in East Java, Indonesia. *Heliyon*, 9(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21637>
- Sukandi Andi, A. (2024). Analysis of Opportunities and Challenges for Subang City within the Framework Rebana Triangle Economic Region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 68–83.
- Susilowati, & Alfrida Sulastri Putri, K. (2024). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 257–261. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.238>
- Talli, A. S., & Sulaiman. (2024). Membangkitkan Kekuatan UMKM: Strategi dan Dampak Program Bantuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 6(2), 1–8.
- Tambunan, T. T. H. (2012). Peran Usaha Mikro dan Kecil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 31–2012. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.73-92>
- Tholib, H. H., Ahmadi, S., & Marzuki, A. (2023). Membangun Daya Saing Para Pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 2101–2117. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11520>

2. Buku

- Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building*. Universitas Brawijaya Press.

- Horton, D. (2003). *Evaluating Capacity Development. Experiences from Research and Development Organizations around the World*. IDRC.
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Publica Institute Jakarta.
- Kairupan, S. (2024). *Isu-Isu Pembangunan* (T. Media, Ed.). Tahta Media Group.
- Khairunnisa, I., Ekasari, D., Rida, H., Budi, R., Mekaniwati, H. A., Widjaja, W., Artha, N., Teguh, M., Nur, P. T., Annisa, H., Faried, I., Purwanti, T., & Umar, M. (2022). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* (Ariyanto & T. P. Wahyuni, Eds.). PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.

3. Sumber Lain

- BPS. (2024a). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2020-2024*.
- BPS. (2024b). *Profil Industri Mikro dan Kecil*.
- BPS Indonesia. (2024). *[Seri 2010] PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/-seri-2010--pdb-menurut-lapangan-usaha-seri-2010--milyar-rupiah-.html>
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2024). *Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2023*.
- Canadian International Development Agency, & Policy Branch. (2000). *Capacity Development: Why, What and How* (Vol. 1, Issue 1).
- Feriyanto, N. (2021). *Digitalisasi UMKM untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pencapaian SDGs*. Universitas Islam Indonesia.
- Kementrian Koordinator. (2023). *Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Milèn, A. (2001). *An overview of existing knowledge and good practice*.
- Milen, A. (2001). *What do we know about capacity building? An overview of existing knowledge and good practice*.
- Morgan, P. (2006). *The Concept of Capacity*. European Centre for Development Policy Management.
- Pambudy, R. (1999). *Perilaku Komunikasi, Perilaku Wirausaha Peternak, dan Penyuluhan dalam Sistem Agribisnis Peternakan Ayam*. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Pearson, J. (2011). *Training and Beyond: Seeking Better Practices for Capacity Development* (OECD Development Co-Operation Working Papers, Vol. 1). <https://doi.org/10.1787/5kgf1nsnj8tf-en>
- Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri.

Soeprapto, H. R. R. (2006). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

United Nations Development Programme. (2008). *Capacity Development Practice Note*.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A